

KENABIAN DAN PROGNOSE HISTORIS

Tinjauan atas Tulisan-Tulisan Romo van Lith

Fl. Hasto Rosariyanto

Abstract:

Though as a film, SOEGIJA was primarily thought as a Catholic film, it has actually another important theme, namely, nationalism. This writing sought to show that the involvement of the Catholic Church in the national struggle has actually a long history. It goes back to a well-known Dutch missionary called Rev. F. van Lith, SJ. In his time, he proposed a different strategy of doing missionary work. Instead of baptizing, he chose a completely different approach, namely, cultural approach. His choice was based on his respect to indigenous culture. And in turn, it shaped his political vision as well. A missionary Church must be in the part of local people, less she would find difficulties. Three key words should be mentioned here: independent, involvement and liberation.

Kata Kunci:

Sejarah gereja katolik – keterlibatan politik – van Lith – keterlibatan Gereja – politik etika – keterlibatan dan pembebasan – dua lembaga

Pengantar

Film SOEGIJA diputar di gedung-gedung bioskop sejak awal Juni 2012 yang lalu. Yang tertarik untuk menonton tidak terbatas pada kalangan Katolik tetapi juga kelompok masyarakat lain. Media cetak juga tidak ketinggalan memberi tanggapan atas besarnya antusiasme penonton tetapi juga mengulas film itu sendiri. Tanpa mengurangi tingginya popularitas sutradara, Garin Nugroho, film SOEGIJA menjadi bahan pembicaraan terutama karena tema yang diangkat: kebangsaan. Atau, dalam bahasa Mgr. Soegijapranata, 100% Katolik 100% Indonesia. Tidak ada pertentangan antara memeluk Katolik dengan menjadi warga negara Indonesia.

Tulisan ini ingin mengajak pembaca untuk menelusuri kembali perjalanan gagasan kebangsaan tersebut dalam konteks Sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Konteks sejarah dipandang mutlak perlu untuk memperlihatkan betapa gagasan Mgr. Soegija tersebut melewati perjalanan dan pergulatan yang panjang dan sungguh tidak selalu mudah. Lebih dari itu, lewat pemaparan konteks sejarah juga diharapkan akan terbangun kesadaran bahwa persoalan kebangsaan di Indonesia tidak pernah lekang oleh waktu. Untuk Gereja Katolik pada khususnya, komitmen

akan keterlibatan dalam masyarakat merupakan tuntutan yang senantiasa harus diperbaharui terus-menerus sesuai dengan perjalanan dan pergulatan bangsa ini. Yang lebih penting lagi, Sejarah Gereja Katolik di Indonesia ternyata memperlihatkan bahwa upaya Gereja katolik untuk selalu melibatkan diri dalam pergulatan bangsa ini sudah ada sebelum kemerdekaan tahun 1945. Bahkan sejarah mencatat bahwa upaya keterlibatan itu sudah dimulai sebelum adanya deklarasi kesatuan nusa, bangsa, dan bahasa. Atau yang lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

1. Catatan-catatan Pastoral Romo van Lith

Mgr. Soegijapranata adalah salah satu dari angkatan-angkatan pertama Sekolah Muntilan yang didirikan oleh Romo van Lith. Kedekatan relasi guru-murid antara keduanya paling jelas terdokumentasikan dalam surat pribadi Soegija menanggapi berita kematian Romo van Lith pada tahun 1926. Waktu itu Soegija sedang menjalani studi persiapan imamat sebagai Jesuit di Negeri Belanda. Di samping menyebut Romo van Lith sebagai pendiri misi Jawa, dalam tulisannya itu Soegija juga mengungkapkan besarnya pengaruh Romo van Lith atas diri para murid lulusan Sekolah Muntilan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pandangan-pandangan Soegija, termasuk pandangan politiknya, sangat dipengaruhi oleh gurunya tersebut. Tulisan ini akan dimulai dengan menyelusuri tulisan-tulisan Romo van Lith terutama yang berkaitan dengan pandangan-pandangan politiknya tentu saja dengan menempatkan dalam konteks historisnya. Sesuai dengan tujuan tulisan ini sekaligus akan diperlihatkan dampak tulisan Romo van Lith tersebut dalam perjalanan sejarah.

1.1 Sekilas Pandangan van Lith

Romo van Lith dikenal sebagai pendiri dan perintis misi Jawa¹. Atau, berkembangnya Gereja Katolik di Indonesia menjadi seperti adanya sekarang tidak bisa dilepas begitu saja dari strategi misi yang dicanangkan oleh Romo van Lith. Berbeda dengan *trend* umum strategi misi yang ada pada waktu itu, Romo van Lith mendasarkan pendekatan misinya pada dimensi historis-budaya. Maksudnya, di dalam usahanya untuk memahami masyarakat Jawa, van Lith mulai dengan mempelajari budaya, dan budaya itu diletakkan dalam konteks historis masyarakat Jawa. Pandangan ini bukan hanya berbeda bahkan tidak jarang dianggap melawan “teologi misi” yang dianut oleh Gereja pada umumnya. Karya misi tidak bisa tidak harus diawali dengan pengenalan akan sejarah dan budaya dari wilayah yang bersangkutan. Semakin masuk kedalam sejarah dan budaya masyarakat Jawa, semakin berkembang juga di dalam diri van Lith rasa hormat dan cintanya kepada masyarakat Jawa. Rasa hormat dan cinta inilah yang mendasari pilihan-pilihan karya misinya, antara lain (1) penghargaan terhadap tradisi dan kebudayaan lokal sebagai titik berangkat dari sepak terjangnya², (2) usahanya yang tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pendidikan pribumi termasuk di dalamnya tenaga-tenaga gerejani³,

dan (3) upayanya untuk membawa bangsa Indonesia pada kedudukan yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang tampak dalam visi politik-nya. Dengan lain kata, karya misi harus sampai membawa masyarakat yang dilayani pada kemerdekaan. Pembebasan.

1.1.1 Romo van Lith dan Visi Politiknya

Ulasan ini akan membatasi diri pada visi politik van Lith. Meskipun demikian sejak dari awal perlu diketahui bahwa visi politik-nya (1) memang pertama-tama lahir dari rasa hormat dan cintanya kepada bangsa Indonesia; apapun pilihan karyanya tidak hanya di bidang politik, hanya saja (2) keterlibatan politik-nya tidak muncul dari awal kegiatannya, bahkan inspirasinya pun datang bukan dari konteks masyarakat Indonesia dan, visi politik-nya (3) masih merupakan kelanjutan dari pemahamannya terhadap Politik Etika. Oleh karena itu menurut visi politik-nya Romo van Lith tidak terpisahkan dari keterlibatannya dalam bidang pendidikan pribumi dan budaya setempat.

1.1.1.1 Politik Etika di Hindia-Belanda

Penerapan Politik Etika di Indonesia akan lebih mudah dipahami dengan sejenak melihat geliat politik di Negeri Belanda. Sebagai negara jajahan, apa pun yang terjadi di Hindia-Belanda sedikit banyak merupakan kelanjutan atau terjemahan dari apa yang terjadi di negara induk. Setelah beberapa lama dikuasai oleh Partai-parti yang berhaluan liberal, pada akhir dekade abad XIX pengaruh partai-partai yang ber-inspirasi Kristen di Negeri Belanda makin kuat. Sewaktu koalisi partai-partai Kristen ini berkuasa, mereka menuntut diberlakukannya nilai-nilai Kristen di dalam berpolitik. Para pimpinan partai Kristen ini berpendapat bahwa setelah sekian lama Negeri Belanda menikmati kekayaan dari tanah jajahan, sekaranglah waktunya pemerintah Belanda harus lebih memperhatikan nasib tanah jajahan. Pemerintah Belanda memiliki kewajiban etis-moral untuk membuat tanah jajahan menjadi sejahtera. Kebijakan politik itulah yang kemudian dikenal dengan Politik Etika⁴.

Dalam konteks Sejarah Pergerakan Indonesia, Politik Etika ini merupakan pergeseran politik yang amat penting. Menurut gagasan Politik Etika ini, tanah koloni seharusnya diperintah demi penduduk pribumi dan bukan demi keuntungan negara induk. Dalam pidatonya pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina secara spesifik menyebut kewajiban moral pemerintah Belanda untuk mengembangkan kesejahteraan di tanah jajahan Indonesia. Sementara itu pemerintah kolonial di Indonesia, di lain pihak, selalu berargumentasi bahwa tugas memajukan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan untuk Hindia-Belanda itu melampaui sumber-sumber yang dimiliki pemerintah. Dalam kontkes ini kehadiran misi dan *zending* sedikit banyak dapat meringankan tanggung jawab. Kedekatan “visi” ini oleh sementara

misionaris dianggap sebagai sebetulnya *mixed-blessings* karena pemerintah memakai kedua lembaga keagamaan ini sebagai pelaksanaan subsidi. Disebut *mixed-blessings* karena para misionaris Katolik di satu pihak mendapatkan kepercayaan dari pemerintah kolonial, di lain pihak juga tidak jarang dicurigai sebagai kolaborator penjajah Belanda. Seorang misionaris Jesuit yang banyak bekerja di bidang pendidikan, H. Bastiaanse (1901-1980), merefleksikan praktek tersebut demikian:

“Misi bukanlah, dan tidak akan pernah menjadi, sebuah *task-force* Belanda yang dengan alasan itu kemudian menikmati perlindungan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda di Indonesia membantu sekolah-sekolah misi karena pemerintah bermaksud membawa orang Jawa ke arah perkembangan yang lebih maju dan mencapai kemerdekaan. Di sekolah-sekolah misilah pemerintah mendapatkan sarana yang ampuh untuk mencapai tujuan tersebut”⁵.

Tidak bisa disangkal bahwa secara umum gagasan Politik Etika menciptakan atmosfer politik yang menguntungkan karya-karya awal misi Jawa, konkretnya karya-karya yang dimulai oleh Pater van Lith dalam bidang pendidikan. Sebuah contoh. Sebagai konkretisasi dari Politik Etika, Pemerintah kolonial merencanakan beberapa program pengembangan pendidikan pribumi dan pelayanan kesehatan. Namun, hanya pemerintah pulalah yang mengambil inisiatif dan keputusan. Mereka juga merasa lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh penduduk pribumi. Keikutsertaan penduduk pribumi praktis tidak mendapat tempat. Tepatlah kalau kebijakan tersebut dinilai terlalu paternalistik. Pemerintah Belanda merasa diri sebagai ayah (pater) yang lebih mengetahui apa yang menjadi keperluan anak-nya. Sementara itu Romo van Lith tidak mengkritik Politik Etika karena sebagai gagasan, Politik Etika memang pantas dipuji. Oleh karena itu, daripada menimbulkan konflik yang tidak perlu, Romo van Lith tidak hanya tidak mengkritik Politik Etika tetapi juga tidak mengkritik pendekatan yang terlalu paternalistik tadi. Sebagai prinsip, romo van Lith mendukung Politik Etika. Untuk pelaksanaannya, ia menggunakan metode pendekatannya sendiri. Romo van Lith ingin melibatkan penduduk pribumi: masuk lewat pintu mereka, keluar dengan metodenya sendiri⁶.

1.1.1.2 Filipina: Sumber Inspirasi Berpolitik

Karya monumental Romo van Lith yang paling dikenang memang dalam bidang pendidikan. Jarang orang mengaitkan pemikiran Romo van Lith dengan pandangan dan pemikiran politik, dan itu sangat mudah dipahami. Sampai dengan tahun praktis 1915 Romo van Lith tidak pernah menyebut pemikiran politik baik dalam surat maupun program-program misinya. Perhatian karya misinya masih terfokus pada pendidikan pribumi. Dalam pandangan Romo van Lith, karya pendidikan untuk pribumi begitu penting sampai ia menyimpulkan bahwa masa depan Gereja Katolik di Indonesia akan ditentukan oleh sumbangannya terhadap pendidikan pribumi: “Karya misi manapun yang tidak mulai dengan atau yang tidak berakar pada pendidikan akan menemui kegagalan”⁷. Para imam masa depan di Indonesia,

tulisnya, tidak bisa lain daripada sebagai imam-pendidik. Sekalipun demikian, keterbukaan pemikiran tetapi juga kemampuannya membaca tanda-tanda zaman membawa Romo van Lith masuk ke dalam ranah politik. Sekali lagi, pilihan karya ini pun dilandasi karena rasa cinta-nya kepada pribumi.

Oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1916 Romo van Lith dan seorang anggota dari Komisi untuk Pendidikan Pribumi dikirim ke Filipina untuk melakukan sebuah studi banding. Sebagai catatan, sejak tahun 1898 Filipina berada di bawah otoritas Amerika Serikat. Metode edukatif-Amerika yang mulai ditrapkan di Filipina itulah yang mau dipelajari oleh pemerintah Hindia-Belanda⁸. Untuk Romo van Lith ternyata ada dampak lain yang akan berpengaruh pada kiprahnya di Hindia-Belanda selaku misionaris. Perjalanan di Filipina ternyata telah mentransformasi visi politiknya. Transformasi politik ini baru tampak sewaktu Romo van Lith mulai terlibat langsung dalam kancah perpolitikan di Hindia-Belanda. Demi cintanya kepada pribumi, Romo van Lith terjun ke dunia politik praktis meski atau justru dalam kapasitas-nya sebagai seorang imam dan misionaris Katolik.

1.1.1.3 Gagasan Politik Romo van Lith

Secara amat umum boleh dikatakan bahwa ada tiga gagasan politik Romo van Lith dalam memperjuangkan nasib dan masa depan pribumi, masyarakat Indonesia, yaitu (1) desentralisasi pemerintahan, (2) sistem pemerintahan, dan (3) sikap yang harus dipilih oleh Gereja-misionaris. Perlu diketahui bahwa dalam perjalanan waktu, Romo van Lith memang terlibat langsung dan aktif dalam kancah politik. Terlibat dalam politik praktis. Maksudnya, ide dan gagasan politiknya disampaikan baik secara langsung maupun lewat tulisan. Secara langsung, karena pada tahun 1918 Romo van Lith diangkat oleh pemerintah Hindia-Belanda sebagai anggota *Komisi untuk Revisi Undang-undang Dasar Hindia Belanda* mewakili Gereja Katolik. Dalam peran itulah Romo van Lith turut terlibat secara langsung dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh Badan tersebut dalam menyusun undang-undang baru. Di samping keterlibatan langsung, Romo van Lith juga memaparkan pandangan politiknya lewat tulisan-tulisan. Bahkan gema pandangan politik-nya lewat tulisan-tulisannya tersebut jauh lebih luas dan lebih lama dampaknya karena tidak lagi dibatasi oleh dinding-dinding bangunan, oleh batas-batas wilayah territorial, dan bahkan oleh keterikatan waktu. Terutama dari tulisan-tulisannya itulah keterlibatan Romo van Lith dalam kancah politik bisa ditelusuri kembali.

a. Desentralisasi Pemerintahan

Gagasan-gagasan politik yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan di Hindia-Belanda kiranya merupakan konsekuensi logis dari prinsip dasar Politik Etika yang secara umum bisa dimengerti sebagai “mempersiapkan pribumi untuk memerintah dirinya sendiri”. Gagasan bentuk pemerintahan desentralisasi bukanlah

gagasan murni Romo van Lith. Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah bahwa kebijakan-kebijakan politis yang berkaitan dengan nasib Hindia-Belanda seharusnya diputuskan di Hindia-Belanda, dan bukan di Negeri Belanda. Pada waktu Romo van Lith duduk sebagai anggota Komisi, beberapa perkumpulan politik sudah bermunculan. Ada perkumpulan politik Belanda, ada pula perkumpulan politik pribumi. Sementara itu, *Volksraad* yang dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 dinilai oleh para tokoh pergerakan politik tidak lagi cukup karena ternyata hanya memiliki peran konsultatif. Tentang bentuk pemerintahan-sendiri di Indonesia semua wakil di dalam Komisi sepakat, yakni bentuk desentralisasi. Persoalan yang dihadapi oleh Romo van Lith dalam *Komisi*-nya adalah: Desentralisasi dalam arti mana; atau lebih konkretnya, kepada siapa pemerintahan-sendiri ini akan dipercayakan? Kepada perwakilan Belanda atau perwakilan Indonesia?⁹

Di dalam *Komisi*, Romo van Lith menentang aturan pemilihan yang “secara terencana” akan menggiring perwakilan Belanda sebagai mayoritas. Meskipun menentang, tidak berarti Romo van Lith juga beranggapan bahwa perwakilan Indonesia sudah siap memerintah. Romo van Lith lebih mengusulkan masa transisi, desentralisasi transisional. Maksudnya, perwakilan Belanda mau tidak mau harus melibatkan kelompok pribumi dalam pemerintahan. Dan situasi demikian hanya mungkin kalau perwakilan Belanda justru tidak menjadi mayoritas.

Dalam tulisan-tulisannya Romo van Lith masih menambahkan bahwa selama di bawah pemerintahan kolonial Belanda (1800-1900), pemerintah Hindia Belanda telah memperlakukan rakyat Indonesia tidak lebih sebagai obyek perdagangan, memanfaatkan tenaga rakyat Indonesia tidak lebih sebagai alat produksi pengganti mesin dengan menekan biaya serendah mungkin. Lebih dari itu relasinya terhadap penduduk pribumi tersebut tidak mengalami perubahan sejak zaman VOC (1600-1900), yakni relasi majikan – pekerja; penindas – tertindas; orang asing – pribumi¹⁰. Sebagai seorang imam misionaris Romo van Lith merasakan bahwa secara langsung bentuk relasi tersebut jelas-jelas telah merusak citra Gereja Katolik karena untuk pribumi, Belanda itu identik dengan Kristen. Oleh karena itu Romo van Lith – lewat tulisannya – menyerukan kepada para politisi Kristen di Negeri Belanda supaya memahami situasi tersebut, supaya mereka turut membangun citra Gereja di hadapan para penduduk pribumi. Kesimpulan Romo van Lith: ko-operasi dan hidup berdampingan masih mungkin, tetapi tidak lagi dalam bentuk relasi budak – tuan; pekerja – majikan. Relasi yang dibangun harus berpangkal pada persahabatan antara dua saudara. Dengan kata lain pemerintah kolonial Belanda secara bertahap harus meninggalkan bentuk relasi diskriminatif yang dipertahankannya selama ini.

b. Sistem Pemerintahan

Dalam pandangan Romo van Lith bentuk desentralisasi pemerintahan yang melibatkan penduduk pribumi merupakan bentuk pemerintahan yang terbaik untuk kondisi kemasyarakatan Hindia-Belanda saat itu. Bentuk terbaik karena di satu pihak

kelompok pribumi dinilai belum siap dengan pemerintahan-sendiri, di lain pihak kelompok Belanda tidak bisa melanggengkan relasi model lama, sebuah relasi yang jelas-jelas diskriminatif. Kelompok Belanda secara bertahap harus mempersiapkan kelompok pribumi untuk pemerintahan sendiri, pemerintahan yang otonom. Kalau model desentralisasi transisional tidak bisa terlaksana, bukan mustahil gerakan nasionalis akan semakin radikal. Oleh karena itu – sebagai bantuk alternatif – Romo van Lith mengusulkan model lain yang di Belanda dikenal dengan istilah *Bi-kamer*: Dua Lembaga/Badan.

Mengapa Romo van Lith mengusulkan bentuk Bi-kamer ini sebagai sebuah bentuk alternatif? Dalam teori pemerintahan, Dua Badan ini dibentuk dengan fungsi untuk saling mengontrol. Kalau di Badan yang satu, Dewan Perwakilan Rakyat, kelompok Belanda yang mayoritas, maka di Badan satunya kelompok pribumi yang harus mayoritas. Yang menjadi ide dasar pemikiran Romo van Lith dari bentuk ini adalah adanya satu kepentingan bersama. Adanya keberagaman ras dan kebhinekaan budaya seharusnya tidak menjadi penghalang untuk mencapai kepentingan bersama, yaitu kemajuan dan pertumbuhan sebagai negara. Kooperasi dan dukungan dari masing-masing kelompok justru diperlukan. Untuk kepentingan bersama, masing-masing kelompok dituntut kerelaannya untuk mengorbankan dan melepas sebagian dari kepentingan kelompok.

Gagasan Romo van Lith ini juga dipengaruhi oleh pengamatannya bagaimana orang pribumi juga semakin berkembang. Menganggap pribumi sebagai bangsa yang tetap terbelakang akan bisa menjadi bumerang. Ilustrasinya demikian:

“Banyak orang di Nederland tidak menyadari situasi real di Hindia. Mereka mengira bahwa tak sesuatupun berubah, dan tentu saja mereka keliru. Yang ada sekarang, tidak akan tetap tinggal demikian. Apa yang sekarang lemah, akan menjadi kuat; apa yang kuat, akan menjadi lemah. Sebuah era baru dan dunia baru sedang lahir, dan orang bijak akan mempersiapkan diri”¹¹.

c. *Sikap Gereja – Misionaris*

Posisi politis Romo van Lith dalam *Komisi untuk Revisi Undang-undang* memang unik. Ditunjuk mewakili kelompok Katolik padahal pada saat yang sama Romo van Lith itu seorang imam-misionaris dan yang berkebangsaan Belanda. Lebih unik lagi, kalau memperhatikan pandangan dan gagasan-gagasannya entah yang disampaikan dalam diskusi dan perdebatan langsung atau juga lewat tulisan-tulisannya; tidak mengherankan kalau muncul beragam reaksi. Dalam pandangan pemerintah Hindia-Belanda, gagasan Romo van Lith dinilai terlalu ekstrim dalam memihak kepentingan pribumi sehingga dinilai sebagai seorang pastor merah-sosialis. Di antara misionaris pun masih ada perbedaan besar¹² dalam arti belum atau tidak ada keseragaman pandangan. Romo van Lith sadar akan reaksi yang bisa dimunculkan dari gagasan dan posisi politisnya. Tetapi Romo van Lith juga tahu betul bahwa pandangan dan gagasannya tersebut berdasar pada pandangan resmi Gereja Katolik.

Menurut Romo van Lith, ada saatnya Gereja harus mengambil pilihan dan tidak bisa terus-menerus bersikap netral. Romo van Lith tidak menginginkan bahwa situasi politik di Hindia-Belanda akan sedemikian memburuk sampai pada pecahnya konflik fisik. Tanpa meng-klaim dirinya mewakili suara para misionaris, Romo van Lith menegaskan bahwa dirinya akan berpihak pada kelompok pribumi kalau keadaan terburuk harus terjadi. Dalam situasi demikian Romo van Lith mengajak para misionaris untuk tidak mengulangi kesalahan yang dibuat oleh Gereja di Filipina. Keberpihakan Gereja Filipina pada penguasa kolonial Spanyol berakhir tragis¹³. Gereja Katolik tidak hanya berhadapan dengan para pejuang kemerdekaan tetapi dipandang sebagai musuh pribumi. Berarti berhadapan dengan umatnya sendiri.

Romo van Lith tetap menerima adanya perbedaan pandangan politis di antara misionaris. Sekalipun demikian Romo van Lith tetap mengharapkan supaya para misionaris bergabung sepenuh hati dengan perjuangan pribumi dan memberi rasa simpati terhadap gerakan mereka. Masih menurut Romo van Lith, para misionaris harus menjadikan pribumi itu sebagai anak-anak rohani mereka. Ia menuliskan demikian:

“Misionaris telah meninggalkan tanah air, keluarga, famili, dan kerabatnya untuk menyatukan diri dengan komunitas kristen. Kepada mereka itulah ia dipanggil untuk mencurahkan cintanya; kepada mereka inilah hatinya diserahkan. Ia harus setia kepada cintanya, dan karena itu seharusnya hati-nya diberikan kepada mereka ini, kepada anak-anaknya”¹⁴.

2. Sikap Politis Gereja Sesudah Era Romo van Lith

“Kemajuan” merupakan kata kunci yang terkandung dalam Politik Etika. Berkat Politik Etika itulah kelompok pribumi mulai bersuara dan bisa menyampaikan aspirasinya. Munculnya gerakan-gerakan politik pribumi harus diletakkan dalam konteks ini. Pemerintah kolonial Hindia-Belanda begitu lamban dalam mengakomodasi aspirasi pribumi. Akibatnya gerakan-gerakan nasional meninggalkan sifatnya dari yang ko-operatif ke arah non-kooperatif, konkretnya menjadi lebih radikal di dalam menentang pemerintah. Sampai dengan meninggalnya pada tanggal 9 Januari 1926 Romo van Lith memang masih belum menyaksikan munculnya gerakan-gerakan yang berskala nasional. Gerakan-gerakan yang ada masih berwarna kedaerahan, kesukuan atau keagamaan: Partai Sarekat Islam, Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, dll. Baru pada tanggal 28 Oktober 1928, kesatuan nusa, bangsa, dan bahasa dideklarasikan oleh gerakan pemuda yang kemudian akan dicatat dalam sejarah sebagai Hari Sumpah Pemuda. Gagasan-gagasan politik Romo van Lith sendiri akan segera menjadi warisan dan landasan bagi perjuangan politik para muridnya. Artinya, apa yang ditulis oleh Romo van Lith dipandang oleh para muridnya sebagai bentuk undangan yang dialamatkan kepada mereka pula.

2.1 Bergerak dari *ad intra* ke *ad extra*

Warisan perjuangan Romo van Lith selama berkarya di Indonesia boleh dikatakan terangkum padat dalam kata mandiri, keterlibatan dan pembebasan. Tiga kata tersebut melandasi segala strateginya dalam bidang kegerejaan, sosial-ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. “Karya misi tidak bisa dikatakan berhasil kalau tidak mampu mengangkat taraf hidup ekonomi rakyat pedesaan”, begitulah rumusan bebas dari awal karyanya di antara para petani-desa. Keterlibatan Gereja harus mulai dari keprihatinan masyarakat yang dilayani. Prinsip berkaryanya ini akan diterjemahkan dalam pelbagai bentuk karya lain dan di waktu yang berbeda. Para mantan muridnya di Kolese Xaverius, Muntilan, Jawa Tengah akan melanjutkan prinsip Romo van Lith tersebut juga – atau lebih tepat terutama – sesudah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia (KUKSI) 1948¹⁵, salah satu murid Romo van Lith, Ignatius Joseph Kasimo, menjadi penggagas dan pemrakarsa. Inilah kali pertama umat Katolik dari seluruh Indonesia datang berkumpul sebagai saudara seiman dan setanah air. Lebih dari itu, inilah kongres nasional yang pertama kali dari suatu golongan masyarakat setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Oleh karena itu bahwa KUKSI I tersebut bisa terlaksana sudah merupakan prestasi yang pantas dicatat dengan tinta emas oleh umat Katolik. Kelompok agama yang kecil dan keberadaan-nya tersebar di pelbagai daerah itu telah menyadari diri mereka sebagai warga dari satu negara yang sama. Salah satu tujuan dari KUKSI I ini adalah menciptakan persatuan di antara umat Katolik. Konkretnya adalah penyelarasan semua organisasi Katolik di bawah satu bendera dan satu nama¹⁶. Bagi umat Katolik di Indonesia, keselarasan dan kesatuan nama ini penting tidak hanya secara organisatoris tetapi juga memiliki makna dan nilai politis. Di samping terbentuknya Partai Katolik, dalam KUKSI I ini pulalah lahir AMKRI (Pemuda Katolik), PMKRI (Mahasiswa Katolik), WKRI (Wanita Katolik), dan lain-lain. Dengan ini segala organisasi kedaerahan dan kesukuan dilebur dalam satu wadah kesatuan Indonesia. Penggalangan kegiatan sosial-politik di antara kaum awam menjadi sesuatu yang penting kalau diingat bahwa Hierarki Gereja Indonesia sendiri baru akan berdiri pada tahun 1961.

Kalau tujuan dari KUKSI I 1949 lebih pada menciptakan kesadaran seiman dan setanah air (*ad intra*), dalam KUKSI II tahun 1954 fokus perhatian diarahkan pada bentuk-bentuk partisipasi dan keterlibatan Gereja Katolik terhadap keprihatinan negara Indonesia (*ad extra*). Kelompok dan gerakan sosial kemasyarakatan dibangun bukan hanya untuk kepentingan internal Gereja tetapi juga sebagai bentuk konkret dari perutusan Yesus sendiri: “Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam ruang itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan

Bapamu yang di sorga” (Mat 5, 14-16). Tuntutan tetapi juga sekaligus panggilan bagi Gereja Katolik untuk berpartisipasi dan terlibat pada kepentingan dan pembangunan bangsa secara eksplisit tampak dalam sambutan Mgr. Soegijapranata, juga mantan murid Romo van Lith dan sekaligus Penanggungjawab dari KUKSI II ini:

“..... meskipun kita umat Katolik sebenarnya setjara beraneka warna telah mewujudkan persatuan, akan tetapi sebagai umat Katolik Indonesia, perlulah menampakkan persatuan kita yang jelas dan tegas.

Sebab, hanya dengan bersatu padu dan bertekad bulat, kita akan mampu meluluskan tugas kita bersama ialah: (a) Menjelamatkan, memperkuat, dan memperkembangkan Geredja kita di tanah air kita dengan leluasa, berkat perhatian dan djaminan Pemerintah, yang berdasarkan Pantjasila seperti sekarang ini; (b) Mempersembahkan gaja dan daja, tenaga dan suara, untuk kesedjahteraan dan perkembangan Negara kita Republik Indonesia ke arah kesempurnaan”¹⁷.

2.2 Gereja dan Dunia yang Berubah

Dalam periode 1960-1970, terjadi perubahan besar bagi umat Katolik di Indonesia, bahkan tidak berlebihan untuk mengatakannya sebagai sebuah revolusi. Perubahan pertama adalah sebagai akibat dari Konsili Vatikan II – yang lebih merupakan perubahan internal Gereja. Perubahan kedua disebabkan oleh Peristiwa G30S/PKI yang akan dan telah mengubah peta politik negara Indonesia – yang boleh dikatakan merupakan perubahan eksternal. Secara politis, yang terjadi di Indonesia bukan hanya perubahan pimpinan pemerintahan tetapi juga *policy*-nya. Dengan menyebut pemerintahan-nya sebagai sebagai pemerintah Orde Baru kiranya secara politis mau ditampakkan sisi ketidakersambungannya, diskontinuitasnya, dengan era sebelumnya yang kemudian disebut Orde Lama. Di tengah-tengah dua perubahan ini – internal maupun eksternal – umat Katolik di Indonesia merasa perlu adanya pegangan dari pimpinan Gereja.

Berikut akan disampaikan beberapa peristiwa yang kiranya dapat membantu untuk menemukan “bagaimana” Gereja menanggapi tantangan konkret dalam perubahan yang terkadang dirasa begitu cepat. Bukan “isi”-nya yang akan dipaparkan tetapi sekedar membatasi bidang-bidang apa saja yang secara konsisten mendapat perhatian Gereja. Bahkan dari sana saja, sudah akan kelihatan bagaimana gagasan politik Romo van Lith secara konsisten tetap mewarnai.

Musyawarah Umat Katolik Seluruh Indonesia (MUKSI) 1972 kiranya merupakan pertemuan nasional umat Katolik yang pertama setelah terjadinya dua peristiwa tersebut di atas. MUKSI sendiri bertujuan untuk menggarap pemikiran-pemikiran yang nantinya dapat disumbangkan bagi pembangunan Indonesia. Ada tiga bidang sentral yang didiskusikan, yaitu (1) sosio-edukatif, (2) sosio-politik, dan (3) sosio-ekonomi¹⁸. Sekedar catatan tambahan tetapi tetap penting dalam memahami perjalanan sejarah Indonesia, pada Sidang Umum MPR tahun 1973

antara lain diputuskan penyederhanaan partai politik menjadi tiga: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Peristiwa tersebut penting bagi Gereja di Indonesia karena sejak saat itu berakhirlah sejarah Partai Katolik yang telah diintegrasikan ke dalam PDI bersama dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA).¹⁹

Berbeda dengan pertemuan-pertemuan nasional sebelumnya, Pertemuan Nasional Umat Katolik Indonesia (PNUKI) pada tahun 1984 bisa disiapkan dengan lebih terprogram dan dalam prosesnya melibatkan segenap umat Katolik sampai pada kelompok terkecil, Lingkungan. PNUKI sendiri diadakan dalam rangka perayaan 450 tahun kehadiran Gereja Katolik di nusantara, dan karenanya nuansa syukur lebih terasa. Sebagaimana tampak dalam topik-topik diskusi yang dipilih, tujuan diadakannya PNUKI adalah untuk peningkatan partisipasi umat dalam pembangunan masyarakat Pancasila²⁰. Pada akhir pelaksanaan PNUKI, di samping dihasilkan delapan butir kesepakatan, tidak dapat disangkal mulai dirasa adanya keprihatinan atas merebaknya praktek-praktek penyelewengan. Ungkapan keprihatinan ini paling jelas dan tegas terumus dalam imbauan para uskup bagi umat yang berkecimpung dalam hidup kemasyarakatan dan politik:

“Kami tidak dapat mewajibkan semua saudara seiman supaya menjadi pahlawan. Namun, kami berharap dan berdoa supaya tetap terdapat di kalangan umat kita, banyak orang yang tegas-tegas menolak ikut dalam permainan kotor mana pun [.....]. Kami meminta dengan sangat supaya orang Katolik memberi teladan sebersih mungkin di mana saja mereka berkarya dan berusaha. Orang Katolik hendaknya menjaga diri terhadap praktek-praktek yang tidak terpuji itu, seperti sogokan, penggelapan, koneksi, manipulasi, intrik, dan sebagainya”²¹.

Oleh dunia internasional Gereja Katolik di Indonesia memang dinilai “sangat bersahabat” dengan pemerintah; dan kenyataan itu sangat bisa dipahami. Gereja jarang atau bahkan tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras dan kontroversial terhadap pemerintah. Namun banyaknya kerusuhan yang bernuansa sentimen sosial-keagamaan, teristimewa maraknya perusakan dan pembakaran Gereja selama tahun 1996 menghadapkan Gereja untuk mengambil sikap yang jelas dan tegas. Dalam konteks itulah Surat Gembala Prapaska 1997 harus ditempatkan dan dikerangkai. Dari sekian catatan kritis yang dipaparkan, pandangan Surat Gembala terhadap Pemilihan Umum merupakan butir yang paling mendapat reaksi luas; tidak hanya di kalangan internal Gereja, dan tidak sebatas wilayah Indonesia. Berikut dikutipkan beberapa frase dari pernyataan kontroversial dan keras yang dimaksud:

“... Sebagai gembala, kami menyatakan bahwa umat Katolik hendaknya merasa betul-betul bebas untuk menentukan sikapnya dalam Pemilihan Umum. Anda

bebas memilih mana di antara tiga kontestan yang dianggap paling sesuai. Kalau Anda sungguh-sungguh merasa tidak terwakili dan yakin dengan suara hati yang jernih dan kuat bahwa kedaulatan Anda tidak tersalurkan, kami dapat mengerti bahwa Anda mengungkapkan tanggungjawab dan kebebasan Anda dengan tidak memilih, dan Anda tidak berdosa apabila tidak memberikan suara..."²².

Penutup

Strategi misi Romo van Lith terangkum dalam tiga kata kunci ini: mandiri, keterlibatan, dan pembebasan. Berakar pada cintanya kepada perutusan Yesus sendiri Romo van Lith selalu berupaya untuk menterjemahkan tiga kata tersebut sesuai dengan konteks kebutuhan umat yang dilayani. Romo van Lith meninggal empat puluh tahun sebelum Konsili Vatikan II. Namun ajakan Konsili Vatikan II agar Gereja terlibat dalam dunia seakan sudah bergema di telinga Romo van Lith saat itu. Strategi misi Romo van Lith, yakni melibatkan diri dalam keprihatinan masyarakat, telah tertanam dalam hati para muridnya di Kolese Xaverius, Muntilan. Kalau Gereja Katolik di Indonesia ingin agar tugas perutusannya tetap relevan dan signifikan, pertama-tama Gereja harus memahami apakah senyatanya yang menjadi keprihatinan dan kebutuhan masyarakat sekarang ini dan di sini, *hic et nunc*. Membaca *Gaudium et Spes* artikel 1, orang akan diingatkan akan rasa hormat dan cinta Romo van Lith pada tanah misi: "Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi, yang tak bergema di hati mereka...". Catatan-catatan Romo van Lith yang dimulai sejak awal abad XX secara bertahap menjadi pegangan Gereja Katolik di Indonesia di dalam melibatkan diri. Juga kalau sejak awal tulisan-tulisan itu menimbulkan perbantahan. Benar, itulah suara kenabian.

Floribertus Hasto Rosariyanto, SJ

Program Studi Ilmu Teologi, Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta; Kolese St. Ignatius, Jl. Abubakar Ali 1, Yogyakarta; e-mail: florirosario@gmail.com.

Catatan Akhir:

- ¹ Frans Satiman, "Pastoor van Lith volgens een Javaansche Leerling en voreerder" (manuskrip). Maastricht, Januari, 1926; J. van Rijckevorsel, Pastoor F. van Lith S.J. *De stichter van de missie in Midden-Java 1863-1926*, Nijmegen, 1952.
- ² Ada banyak tulisan dengan tema ini yang belum diterbitkan. Lima di antaranya masih tersimpan baik di Curia Jesuit Roma: (1) Het geheim van den Javaan; (2) De besnijdenis; (3) De besnijdenis op Java; (4) Het Javaansche huwelijk in verband met de besnijdenis; (5) De casus van het Javaansche huwelijk.
- ³ Frans van Lith, "Hoe kan het onderwijs de Missie dienen", A. Hermus dan A. De Wit (eds.), *Eerste International Missiecongres*, Utrecht, 1923, hlm. 94; I.J. Brugmans, *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indie*, 's-Gravenhage, 1938; Robert van Neil, *The emergence of the modern Indonesian elite*, Dordrecht-Holland, 1984; Kroeskamp, *Early Schoolmasters in Developing Country. A history of experiments*

in school education in 19th century Indonesia, Assen-The Netherlands, 1974.

- ⁴ Marteen Kuitenbrouwer, *Nederland en de opkomsst van het moderne imperialisme*, Amsterdam, 1985, hlm 101; E. Locher Scholten, *Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel*, Utrecht, 1981, hlm. 121 dan 176.
- ⁵ H. Bastiaanse, "Nationalisme en Missie op Java", *Kolonial Missietijdschrift*, 15 (1932), hlm. 78.
- ⁶ P.G.H. Schreurs, *Terug in het erfgoed van Fransiscus Xaverius; het herstel van de katholieke missie in Maluku 1886-1960*, Tilburg, 1992, hlm. 156-163.
- ⁷ "Aan Kardinaal van Rossum", hlm. 8.
- ⁸ Frans van Lith, "Mijn Manila-reis", *Mededeelingen van de Nederlands Provincie*, 1922, hlm 30-34, 71-76, 107-111.
- ⁹ Frans van Lith, "De politiek van Nederland ten gezichte van Nederlandsch-Indie," *Studien*, 54/98 (1922), hlm. 281-282.
- ¹⁰ Frans van Lith, "De politiek van Nederland ten gezichte van Nederlandsch-Indie," *Studien*, 54/98 (1922), hlm. 289-290; "aan Kardinaal van Rossum", hlm. 4.
- ¹¹ Frans van Lith, "De politiek van Nederland ten gezichte van Nederlandsch-Indie," *Studien*, 54/98 (1922), hlm. 327-328.
- ¹² Frans van Lith, "De politiek van Nederland ten gezichte van Nederlandsch-Indie," *Studien*, 54/98 (1922), hlm. 280-297, 323-346. Surat Pater J. Van Rihkevorsel kepada Provinsial C. Raaymakers. Weltevreden, 3-10-17 Pebruari 1923; 3-19-24 Maret 1923.
- ¹³ Frans van Lith, "Leeren uit de Filippijnen", hlm. 34.
- ¹⁴ Frans van Lith, "Leeren uit de Filippijnen", hlm. 31.
- ¹⁵ Y. Adisubrata (ed.), *I.J. Kasimo. Hidup dan perjuangannya*, Jakarta, 1980; J.B. Soedarmanta, *Politik Bermartabat. Biografi I.J. Kasimo*, Jakarta, 2011.
- ¹⁶ Y. Adisubrata (ed.), *I.J. Kasimo. Hidup dan perjuangannya*, Jakarta, 1980, hlm. 69.
- ¹⁷ Sambutan Mgr. Albertus Soegijapranata, Vikaris Apostolik Semarang, KUKSI 27-29 Desember 1954, hlm. 5.
- ¹⁸ Secara ringkas, peristiwa ini dilaporkan oleh *HIDUP*, 17 September 1972.
- ¹⁹ MURBA: Musyawarah Rakyat Banyak adalah sebuah partai politik Indonesia yang didirikan pada tanggal 7 November 1948 oleh Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik. Pada era Orde Lama, partai ini sempat dibekukan karena posisinya terhadap Partai Komunis Indonesia. Pada era Orde Baru direhabilitasi, dan kemudian di-fusi-kan ke dalam PDI pada tahun 1973. Pada kesempatan pemilu 1999 menjadi salah satu kontestan dengan nama Partai MURBA tetapi tidak mendapatkan kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak mencapai treshold yang ditentukan.
- ²⁰ Sambutan Bapak H. Munawir Sjadzali, Menteri Agama RI, di dalam acara Pembukaan PNUKI pada tanggal 8 Juli 1984.
- ²¹ Dikutip dari ceramah Mgr. Dr. A.B. Sinaga yang bertajuk "Kesatuan Iman dan Kepelbagaian Pengamalannya", disampaikan dalam PNUKI pada tanggal 10 Juni 1984.
- ²² Tanggapan, reaksi, dan diskusi-diskusi yang dilaksanakan dalam rangka menanggapi Surat Gembala Prapaskah 1997 ini dilaporkan dalam *HIDUP*, 15 Juni 1997.

Daftar Pustaka:

Adisubrata, Y. (ed.)

1980 *I.J. Kasimo. Hidup dan Pewartaannya*, Jakarta: Gramedia.

Bastiaanse, H.

1932 "Nationalisme en Missie op Java", *Kolonial Missietijdschrift*, 15 (1932).

Brugmans, I.J.

1938 *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indie*, 's-Gravenhage.

Kroeskamp,

- 1974 *Early Schoolmasters in Developing Country. A history of experiments in school education in 19th century Indonesia*, Assen-The Netherlands.

Kuitenbrouwer, Marteen

- 1985 *Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme*, Amsterdam.

van Lith, Frans

- 1922 "Mijn Manila-reis", *Mededeelingen van de Nederlands Provincie*.
1922 "De politiek van Nederland ten gezichte van Nederlandsch-Indie," *Studien*, 54/98 (1922).
1923 "Hoe kan het onderwijs de Missie dienen", A. Hermus dan A. De Wit (eds.), *Eerste International Missiecongres*, Utrecht.

Locher Scholten, E.

- 1981 *Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel*, Utrecht.

van Neil, Robert

- 1984 *The emergence of the modern Indonesian elite*, Dordrecht-Holland.

van Rijckevorsel, J.

- 1952 *Pastoor F. van Lith S.J. De stichter van de missie in Midden-Java 1863-1926*, Nijmegen.

Satiman, Frans

- 1926 "Pastoor van Lith volgens een Javaansche Leerling en voreerder" (manuskrip). Maastricht, Januari.

Schreurs, P.G.H.

- 1992 *Terug in het erfgoed van Fransiscus Xaverius; het herstel van de katholieke missie in Maluku 1886-1960*, Tilburg, 1992.

Soedarmanta, Y.B.,

- 2011 *Politik Bermartabat. Biografi I.J. Kasimo*, Jakarta: Gramedia.